

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA KUPANG, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang belum dilakukan secara maksimal. Hal ini terlihat dari belum dilaksanakannya sosialisasi tentang kebijakan penanganan sampah termasuk tujuan, maksud, dan ketentuan-ketentuan di dalamnya serta manfaat dan bahaya yang diakibatkan oleh sampah secara integral dan terarah kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan (target group). Penyampaian informasi yang dilakukan oleh implementor yakni dari Dinas Kebersihan selama ini adalah mensosialisasikan isi Perda ini kepada lurah untuk kemudian di sampaikan kepada masyarakat. Selama ini yang dilakukan lurah juga hanya menekankan pada himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. Sarana penyaluran informasi juga tidak dimanfaatkan secara baik. Hal ini mengakibatkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah.

- 2 Dinas Kebersihan Kota Kupang sampai saat ini masih kekurangan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Hal ini ditunjukkan dengan kekuatan sumber daya manusia yang belum mencukupi berbagai sektor kerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan Kota Kupang. Hal ini mengakibatkan belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing.
- 3 Kecilnya anggaran operasional yang dimiliki Dinas Kebersihan Kota Kupang menyebabkan kegiatan operasional di lapangan tidak dapat dilakukan secara optimal. Setiap kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh dinas kebersihan sejauh ini masih sangat minim.
- 4 Fasilitas penunjang setiap kegiatan operasional yang harus dimiliki oleh aparat di lapangan masih sangat terbatas misalnya kendaraan pengangkut sampah, TPS agar masyarakat mengumpulkan sampah yang dihasilkan dan mengadakan alat berat penghancur sampah. Minimnya anggaran operasional menjadi alasan utama belum dapat dilakukannya pengadaan berbagai fasilitas tersebut.
- 5 Para implementor memiliki komitmen dan dukungan yang sangat besar terhadap kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari penyelesaian tugas dan tanggung jawab tidak semata-mata karena tugas fungsional yang diemban namun lebih terlihat sebagai bentuk komitmen dan dukungan mereka dalam melaksanakan tugas walaupun tidak didukung dengan fasilitas dan sumber daya finansial yang memadai.

- 6 Fragmentasi tugas dan tanggung jawab Perda No 3 tahun 2011 belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari belum adanya kerja sama yang baik antara pemerintah (Dinas Kebersihan), Lurah serta Rt dan Rw dalam mendukung pencapaian tujuan dari perda penanganan sampah. Hal ini terlihat dari kurang rutinnya lurah dan Rt serta Rw dalam mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada masyarakat juga kurang rutinnya kegiatan nyata seperti kerja bakti untuk membersihkan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka saran penulis dalam kaitannya dengan implementasi Perda Nomor 3 tahun 2011 adalah

1. Pemerintah Kota Kupang, secara khusus Dinas Kebersihan Kota Kupang agar berupaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini agar apa yang menjadi maksud serta tujuan dari perda No 3 tahun 2011 dapat tercapai.
2. Pemerintah Kota Kupang perlu memperhatikan keterbatasan anggaran yang sedang dialami oleh Dinas Kebersihan Kota Kupang mengingat keterbatasan ini juga berimbas pada kurangnya tersedianya fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas oleh implementor di lapangan.
3. Pemerintah juga perlu melakukan penambahan tenaga ahli pengelolaan sampah di Dinas Kebersihan agar pengelolaan sampah di Kota Kupang tidak sebatas kumpul angkut dan buang tetapi juga dapat dikelola lebih lanjut.

4. Perlu dibangun suatu kerja sama yang baik antara ketiga unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Perda no 3 tahun 2011 yakni Dinas Kebersihan, Lurah dan Rt serta Rw sekota Kupang. Hal ini agar apa yang menjadi tujuan dari perda ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1997. *Manajemen Organisasi* PT. Bina Aksara Jakarta. Agustino Leo.
- 2006 *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV AlfabetaArdana, K. I. Mujiati N
- Utama, M.W.2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Pertama.
- Yogyakarta : Penerbit PT. Graha Ilmu Azwar, Azrul.1996 pengantar administrasi
- kesehatan.Jakarta:Sinar Harapan.Damanhuri, E. (1998). *Optimasi Lahan Sanitary*
- Landfill. Suatu Konsep. *Jurnal Teknik Penyehatan* Edisi MeiDunn N. William 2000.
- Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Press.George R Terry, PhD 1986. *Azas-azas Management*.Bandung:AlumniGibson.
1986. *Organisasi Jakarta* : Bina Aksara.
- Giroth, Lexie M, 2004. *Edukasi dan Profesi Pamong Praja :Publik Policy Studies,*
- Good Governance and Performance Driven Pamong Praja*. Jatinangor : STPDN
- press.
- Hadi, B. K.2001, *Mekanika Struktur Komposit*. Bandung:Departemen Pendidikan
- Nasional..
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, 1984. *Sosiology*,edisi kelapan. Michigan
- Jones, C. O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*, Terjemahan
- Ricky Istanto. Jakarta. *Manajemen PR* Raja Grafindo Persada.

McGraw-Hill. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Islamy,I. 1994. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.Jakarta:Bumi Aksara.

James A.F Stoner.Manajemen Jilid 1. 199>Jakarta: Prenhalindo.

Malayu, S.P. Hasibuan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan Kesembilan, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Nawawi, Ismail. 2009. Public policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek). Penerbit PMN. Surabaya

Ndraha, Taqliziduhu. 1990, Pembangunan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta.

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, 1993. Sosiologi. Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Penerbit Erlangga

Rangkuti, Siti Sundari 1996. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional.Surabaya:Airlangga University Press.

Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.

Siagan P, Sondang.2000. Peranan staf dalam Manajemen.Jakarta:Gumi Aksara.

Sony keraf 2002. Etika Lingkungan. Jakarta : Penerbit buku Kompas.

Subarsono, AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Cetakan V Desember 2010. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta 55167.

Sugiono. 2004. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.

Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Syukani.H.R.2002. Implementasi Kebijakan Publik.Jakarta.

Wahab Abdul Solichin. 1991. Analisis Kebijakan, dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko 2001, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah.Surabaya: Insani Cendekia,.

Dokumen :

Skripsi, Sepriana Tamonob. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang (Studi Kasus di kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima).

Skripsi, Ferki Henuk. 2013. Peran Dinas Kebersihan Kota Kupang dalam mengatasi masalah pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Perumahan RSS, OEsapa, Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan
Penanganan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.